

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI BOJONEGORO

Fatkur Muin

STIE Cendekia Bojonegoro, Jl. Cendekia No.22 Bojonegoro
e-mail: sera_piranti@yahoo.com

Abstract: Factors Affecting Income Dealer Foot Five in Bojonegoro. This research is a research survey conducted on a group of street vendors in the city districts Bojonegoro based on data obtained from the Civil Service Police Unit Bojonegoro. Of the total number of street hawkers in the city district Bojonegoro, research has focused on the 5 (five) community of street vendors in urban districts Bojonegoro. Being a street vendor is an option and of course the choice was based on some of them which are of necessity, to be independent, want to find a fortune that was lawful, to support his family

Abstrak: Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Bojonegoro. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian survey terhadap kelompok Pedagang Kaki Lima yang berada di wilayah kecamatan kota Bojonegoro berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Dari jumlah keseluruhan Pedagang Kaki Lima di wilayah kecamatan Kota Bojonegoro, penelitian di fokuskan pada 5 (lima) paguyuban Pedagang Kaki Lima di wilayah kecamatan kota Bojonegoro. Menjadi PKL adalah sebuah pilihan dan tentunya pilihan itu berdasarkan beberapa hal diantaranya di antaranya adalah karena terpaksa, ingin mandiri, ingin mencari rejeki yang halal, ingin menghidupi keluarga.

Kata Kunci: factor pengaruh, pendapatan, pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima adalah fenomena tentang kehidupan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Hampir di setiap kota di Indonesia keberadaan PKL menjadi fenomena pemerintah, di satu sisi PKL menjadi lahan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan bahan pokoknya sehari-hari. Kebutuhan manusia sendiri di bedakan menjadi 3 yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Pengertian Pedagang Kaki Lima sendiri beragam ada yang mengatakan PKL adalah pedagang yang berkaki lima supaya dapat dengan mudah melarikan diri ketika ada razia dari Satuan Polisi Pamong Praja, tapi pengertian yang lebih pas untuk menggambarkan PKL adalah pedagang atau para pedagang yang melakukan usaha menjual dan menjajakan dan atau mendistribusikan barang dan jasa di sektor informal, yang menggunakan bagian dari fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usahanya.

Menjadi PKL adalah sebuah pilihan dan tentunya pilihan itu berdasarkan beberapa hal

diantaranya di antaranya adalah karena terpaksa, ingin mandiri, ingin mencari rejeki yang halal, ingin menghidupi keluarga.

Keberadaan PKL sering dianggap merusak pemandangan kota dan tidak mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Di wilayah Kecamatan Bojonegoro yang menjadi objek dari penelitian dalam RTRW sudah di tetapkan bahwasanya lokasi berdagang para PKL ditempatkan di daerah Pusat kota dan sepanjang terminal baru sebagai dari pertumbuhan dan penyebaran pedagang kaki lima. Selain tertuang dalam RTRW Kecamatan Bojonegoro Pemerintah Daerah juga sudah membuat peraturan baik Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 atau Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur tentang petunjuk teknis penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro.

Pedagang Kaki Lima (PKL) diasumsikan adalah pedagang yang mempunyai kaki

lima dengan tujuan memudahkan dan membuat pedagang dapat berlari dengan cepat apabila di razia oleh satuan polisi pamong praja. Selain itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai pengertian penjual liar, pedagang yang menempati lokasi yang sebenarnya tidak di peruntukan untuk berdagang seperti trotoar, badan jalan, taman kota serta alun - alun kota. Selain itu, Pedagang Kaki Lima juga di asumsikan adalah pedagang yang mendorong gerobak dengan 2 roda 2 kaki penjual serta satu yang digunakan untuk menjaga gerobak sehingga jika di hitung kakinya menjadi lima.

Di setiap kota dapat dengan mudah kita temui Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya di kanan dan kiri jalan utama kota serta tempat - tempat yang dianggap strategis untuk berjualan. Fenomena PKL juga terjadi di kabupaten Bojonegoro, terlebih lagi di wilayah Kecamatan kota Bojonegoro yang menjadi sentral dari perekonomian, mereka tersebar di jalan - jalan utama Kecamatan kota Bojonegoro mulai dari jalan Diponegoro, jalan Teuku Umar, jalan Pemuda, jalan Gajah mada dan jalan Akhmad yani. Selain tersebar di jalan - jalan Pedagang Kaki Lima juga menempati tempat-tempat berkumpulnya masyarakat Bojonegoro seperti di sekitan alun-alun kota Bojonegoro, Terminal rajekwesi Bojonegoro (baru dan lama) serta di sekitaran pasar kota Bojonegoro. Dengan banyaknya sebaran Pedagang Kaki Lima di kawasan Kecamatan kota Bojonegoro tentunya juga banyak permasalahan yang berkaitan dan di hadapi oleh Pedagang Kaki Lima yang mempengaruhi pendapatan mereka tiap harinya .

METODE

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian survey terhadap kelompok Pedagang Kaki Lima yang berada di wilayah kecamatan kota Bojonegoro berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Dari jumlah keseluruhan Pedagang Kaki Lima di wilayah kecamatan Kota Bojonegoro, penelitian di fokuskan pada 5 (lima) paguyuban Pedagang Kaki Lima di wilayah kecamatan kota Bojonegoro.

Penelitian ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yaitu menemukan, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Untuk mencapai tu-

juan dalam penelitian diperlukan cara yang disebut metode yang nantinya akan digunakan untuk mencapai penelitian yang diharapkan. Penelitian harus dilakukan secara logis dan sistematis artinya sesuai dengan sifat, tujuan, kondisi penelitian yang dilakukan.

Dalam sebuah penelitian ada beberapa cara pengambilan sampel. Dalam penelitian ini dikarenakan jumlah populasi yang terlalu banyak dan berkelompok maka sampel yang diambil adalah 45 orang yang dianggap mewakili tiap kelompok. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah stratified random sampling. Stratified random sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel yang terdiri dari lapisan atau beberapa strata, istilah strata mengandung arti adanya tingkatan tetapi metode ini dapat diterapkan pada populasi yang terdiri atas golongan yang tidak menunjukkan tingkatan. Agar sampelnya juga mencerminkan lapisan-lapisan pada populasi sehingga representatif maka cara pengambilan sampelnya dilakukan dari setiap lapisan secara acak. Apabila proporsi sampelnya tidak sama maka cara pengambilan sampelnya di sebut nonproportional stratified random sampling (irawan soehartono, 2008) .

Dalam pengumpulan data, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, yang mana berupa hasil wawancara ataupun penyebaran kuisisioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber data yang telah tersedia pada suatu tempat dan diperoleh dengan cara metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengutip sumber yang sudah ada. Metode lainnya adalah metode studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Dalam pengumpulan data teknik pengumpulan data dan observasi, interview, kuisisioner, dan studi kepustakaan. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan datang langsung ke beberapa tempat yang tersebar dan menjadi tempat berdagang Pedagang Kaki Lima di wilayah kecamatan kota Bojonegoro berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja. Data yang diperoleh mengenai kegiatan keseharian mengenai perdagangan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara responden secara langsung. Kui-

sioner yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dan atau pernyataan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian di berikan kepada para Pedagang Kaki Lima yang bertempat di wilayah kecamatan kota Bojonegoro. Studi pustaka yaitu mencari dan mengumpulkan data yang sudah ada, baik dari buku, majalah, Koran, Badan Pusat Statistik(BPS), satuan polisi pamong praja, kantor kecamatan kota Bojonegoro, dan data-data yang tersedia.

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian karena merupakan proses penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi.

Analisis Deskriptif Analisis ini digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi responden. Analisis ini berisi tentang bahasan secara deskriptif mengenai jawaban yang diberikan responden pada kuisioner. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis Kuantitatif Regresi atas variabel bebas, ketika dirumuskan fungsi regresi populasi maka variabel-variabel yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh terpisah atau bebas (separate or independent influence) terhadap variabel terikat Y. Tetapi bisa juga terjadi bahwa dalam suatu sampel yang diteliti dipergunakan untuk menguji model fungsi regresi populasi beberapa atau semua variabel bebas X mempunyai hubungan atau korelasi sangat kuat sehingga tidak dapat dipisahkan pengaruh individu masing-masing terhadap Y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) sering diasumsikan pedagang yang berkaki lima dengan tujuan untuk memudahkan dan membuat agar dapat berlari cepat menghinbari kejaran dari Satuan Polisi Pamong Praja. Lebih dari itu sebenarnya Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai definisi penjual liar, pedagang yang menempati lokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan seperti trotoar, badan jalan, taman kota dan sifatnya tidak menetap. selain itu PKL juga diasumsikan mempunyai lima feet (lima kaki)

yang dimaksud adalah lebar trotoar lebih kurang 1,5 m, kemudian berkembang pula pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggunakan gerobak dimana digambarkan 2 roda, 2 kaki dan 1 kaki penyangga gerobak yang jika dijumlah menjadi lima kaki. Istilah pedagang Kaki Lima mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar dipinggir jalan, atau dimuka-muka toko yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil.

Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut alisjahbana adalah karena :

Terpaksa; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain; terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal.

Ingin mencari rejeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan dank arena di desa sudah sulit mencari penghasilan.

Pedagang Kaki Lima Sebagai Satu Jenis Usaha Informal Situasi dan kondisi perkotaan yang semakin maju dan berkembang disertai arus urbanisasi yang tinggi menimbulkan persaingan kerja yang ketat dan keras. Sementara itu sektor formal yang harus diharapkan mampu menyerap tenaga kerja besar ternyata cenderung berorientasi pada modal dan memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup tinggi. Dalam keadaan demikian, keberadaan sektor informal merupakan alternatif yang tersedia serta mampu meredam jumlah pengangguran.

Sethuraman sebagaimana yang dikutip oleh Hidayat (1988, hal.9) mendefinisikan sektor informal terdiri dari unit-unit usaha yang berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri. Dalam usahanya itu sangat dihadapkan pada berbagai kendala seper-

ti: faktor modal, faktor fisik, faktor pengetahuan, dan faktor keterampilan.

Jaya Dinata (1999, hal.146) mengungkapkan, sektor informal bentuknya tidak terorganisasi (kebanyakan usaha sendiri). Cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi, dikerjakan oleh anggota keluarga.

Kabupaten Bojonegoro yang terletak di antara garis Bujur Timur 112o25' dan 112o09' dan diantara garis Lintang Selatan 6o59' dan 7o37' dengan luas wilayah yang lebih dari 2 ribu km² berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Ngawi di bagian selatan, dengan Kabupaten Lamongan di bagian timur, dengan kabupaten Tuban di bagian Utara, dan dengan Propinsi Jawa Tengah di bagian barat. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran bengawan solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi sepanjang kawasan gunung pandan, kramat dan gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29 persen dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian 25 m dan lebih, dan yang lainnya sebanyak 18,71 persen berada pada ketinggian dibawah 25 m. Luas wilayah dengan kemiringan kurang dari 2 persen merupakan yang terluas, kemudian dengan kemiringan antara 2 s/d 14,99 persen (36,16 persen) dan sisanya (8,47 persen) kemiringan diatas 15 persen. Dari wilayah seluas diatas 15 persen. Bojonegoro adalah kabupaten yang terdiri dari 27 kecamatan dari kecamatan Baureno di sebelah Timur dan kecamatan Kedewan di sebelah barat.

Prosentase Penduduk di Bojonegoro menurut hasil registrasi penduduk pertengahan tahun 2009 jumlahnya tercatat sebanyak 1.344.634 orang dan tidak ada penduduk dengan status WNA. Komposisi penduduk adalah 47,55 persennya adalah penduduk laki-laki dan sisanya adalah penduduk perempuan (52,44 persen). Di banding tahun sebelumnya, jumlah penduduk tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 0,21 persen. dari beberapa kecamatan yang ada di wilayah Bojonegoro kepadatan penduduk yang paling banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bojonegoro dengan jumlah 3328 orang/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Bubulan dengan 148 orang/km².

Kecamatan Bojonegoro termasuk wilayah geografis Kabupaten Bojonegoro, yang juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten

Bojonegoro dan terdiri dari 18 (delapan belas) desa/kelurahan. Sedangkan luas wilayah 25,71 km² terdiri dari dataran rendah yang berada disisi selatan aliran bengawan solo, serta dihuni oleh 26.879 kepala keluarga, berpenduduk 84.537 jiwa terdiri dari :

Laki – laki : 41.560 jiwa

Perempuan : 42.977 jiwa

Dengan kepadatan penduduk pada akhir tahun 2009 sebanyak 3.288 jiwa per kilometer.

Pada dasarnya rencana penggunaan wilayah kecamatan Bojonegoro sudah tertuang dalam RTRWK yang disusun oleh BAPPEDA (Badan perencanaan dan pembangunan daerah) Bojonegoro, termasuk di dalamnya lahan yang di peruntukan untuk sentra perdagangan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bojonegoro,

Penyebaran Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro sangat meyeluruh hampir di semua kecamatan ada yang namanya PKL terutama di tempat-tempat strategis seperti pasar kota dan jalan utama kecamatan. Di Kecamatan Bojonegoro sendiri penyebaran pedagang Kaki Lima sangat merata dan berada di setiap fasilitas umum, jalan utama kota, pasar kota dan tempat lapang yang dianggap strategis. Dalam melakukan aktifitas pedagang mereka menggelar barang dagangan ada yang 24 jam dan ada sebagian yang hanya memilih waktu tertentu seperti malam atau siang hari. Pernyataan yang sama di ungkapkan oleh Bpk. Kamidin sebagai berikut ;

“Penyebaran pedagang kaki lima sudah hampir di seluruh kota terutama di jalan utama seperti jalan diponegoro ,jalan pemuda terutama pada malam hari dan untuk di daerah seperti terminal baru mereka tidak mau membersihkan alat berjualannya ketika sudah siang hari padahal mereka sudah diberi fasilitas dari pemerintah kabupaten”

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bojonegoro terlihat sangat semerawut itu pula yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan penertiban dan relokasi PKL ke tempat-tempat yang telah disediakan sehingga tidak merusak pemandangan dan menghilangkan keindahan kota. Dari sebaran PKL tidak hanya masalah lokasi tapi juga jenis barang yang dijual, dalam satu tempat disitu terdapat jenis barang dagangan yang berbeda mulai makanan, sticker, minuman, kaset, dll.

Dilihat dari banyaknya sebaran PKL maka dapat dilihat pula jumlah pedagangnya berarti tingkat pengangguran di kecamatan Bojonegoro dapat teratasi dengan adanya Pedagang Kaki Lima tinggal bagaimana pengelolaan dan pengawasannya.

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bojonegoro Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Bojonegoro, penyebaran Pedagang Kaki Lima tersebar di 66 tempat terdiri dari jalan kota, alun-alun dan tempat-tempat strategis di wilayah kecamatan Bojonegoro dengan jumlah 499 pedagang. Jumlah itu masih sangat mungkin untuk bertambah sesuai dengan kebutuhan dan menyempitnya lapangan pekerjaan dan bertambahnya siswa lulusan baru di tiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah PKL maka daerah sebarannya juga akan bertambah.

Lokasi Berjualan Pedagang Kaki Lima Lokasi berjualan Pedagang Kaki Lima sangat berfariatif yang penting menurut mereka adalah tempatnya nyaman dan dilalui banyak orang sehingga kemungkinan barang dagangan mereka akan laris dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Lokasi usaha PKL adalah bukan merupakan bangunan permanen dan tidak dipergunakan sebagai tempat tinggal, tempat tinggal sementara atau berdomisili.

Lokasi yang dianggap paling strategis untuk berjualan dan banyak mendatangkan keuntungan adalah sebagai berikut :

- a. Jalan-jalan utama kota, trotoar, daerah lapangan yang menjadi pusat orang berkumpul dan melakukan aktifitas sehari-hari
- b. Daerah sekitar rumah sakit, perkantoran, pasar, sekolah-sekolah yang dianggap banyak mendatangkan pembeli.
- c. Daerah sekitar proyek pembangunan terutama yang banyak memakai tenaga kerja dari luar kota Bojonegoro.

Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Dalam peraturan Bupati no 14 tahun 2008 disebutkan bahwa waktu yang diperbolehkan untuk berjualan PKL yaitu antara pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan seizin Bupati melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kondisi di lapangan ternyata berbeda dengan apa yang berada di peraturan Bupati, para PKL tetap berjualan pada waktu-waktu lain seperti pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari bahkan beberapa PKL melakukan aktifitasnya selama 24 jam.

Permodalan adalah bagian penting dalam usaha PKL. Dengan adanya modal PKL dapat menentukan dan membuka lapak atau menjual jenis barang disesuaikan dengan kemampuannya. Rata-rata modal yang dimiliki oleh pedagang kaki lima kecil sehingga kemungkinan untuk mengembangkan usaha pun terbatas. Itu semua juga di karenakan sektor perdagangan khususnya PKL adalah mata pencaharian sampingan atau tambahan untuk memenuhi kebutuhan selama menunggu pekerjaan yang lainnya yang dianggap lebih menguntungkan sehingga mereka tidak menanamkan modal yang besar. Rata-rata modal yang dikeluarkan PKL berkisar Rp. 300.000,00 s/d Rp. 2.000.000,00 bergantung pada jenis barang dan ketersediaan alat-alat lain sehingga PKL tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli lagi.

Pada dasarnya pemerintah daerah Bojonegoro telah membuat peraturan yang berhubungan dengan Pedagang Kaki Lima yang terkait penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten Bojonegoro. Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro nomor 3 tahun 2006 dan peraturan bupati nomor 14 tahun 2008.

Dalam peraturan daerah kabupaten Bojonegoro nomer 3 tahun 2006 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang atau para pedagang yang melakukan kegiatan usaha menjual dan menjajakan dan atau mendistribusikan barang dan jasa disektor informal yang menggunakan bagian dari fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usahanya. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 ini lebih mengatur tentang penggunaan fasilitas umum dan ketentuan perizinan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum dilarang dipergunakan untuk tempat usaha Pedagang Kaki Lima kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pasal 3 (1) penentuan tempat-tempat/fasilitas umum yang dapat dipergunakan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditentukan oleh Bupati Bojonegoro setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) tempat-tempat/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bupati mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan disekitarnya. Pasal 7 berbunyi bahwa untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, pemerintah kabupaten berkewajiban

memberikan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan dan pengawasan secara berkesinambungan. Dalam peraturan daerah ini tidak disebutkan secara jelas tempat-tempat/fasilitas umum mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk ditempati berdagang Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 14 tahun 2008 tentang petunjuk teknis penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bojonegoro. Pasal 2 tentang tempat usaha disebutkan bahwa (1) fasilitas umum dan atau didepan gedung perkantoran swasta maupun pemerintah, dilarang dipergunakan sebagai tempat usaha PKL, kecuali mendapatkan izin bupati. (2) fasilitas atau tempat-tempat umum yang dilarang dipergunakan untuk tempat usaha PKL siang maupun malam adalah :

- a. Sepanjang jalan Achmad Yani;
- b. Sepanjang jalan Gajah mada;
- c. Sepanjang jalan Untung Suropati;
- d. Sepanjang jalan Rajekwesi;
- e. Sepanjang jalan Diponegoro;
- f. Sepanjang jalan Trunojoyo;
- g. Sepanjang jalan P. Mastumapel;
- h. Sepanjang jalan Hasyim Asyhari;
- i. Sepanjang jalan Imam Bonjol;
- j. Sepanjang jalan AKBP M. Suroko;
- k. Sepanjang jalan Pahlawan.

Jenis Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

Pedagang Kaki Lima Ilegal yaitu jenis pedagang kaki lima yang berjualan dan menjualkan barang dagangan di jalan atau lokasi yang tidak atas persetujuan pemerintah daerah dan pengelolaannya di tangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kriteria tempat yang dilarang untuk berjualan PKL seperti tertulis di Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2008.

Pedagang Kaki Lima Legal yaitu Pedagang Kaki Lima yang telah mempunyai izin dan kartu anggota yang terdaftar di satuan Polisi Pamong Praja dan berjualan di lokasi yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah Bojonegoro.

Tata cara pengurusan izin tempat usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana di maksud dalam peraturan bupati nomor 14 tahun 2008 adalah (1) foto kpy KTP sebanyak 2 lembar; (2) Foto kopy kartu keluarga 2 lembar; (3) pas pho-

to ukuran 4x6 2 lembar; (4) persetujuan pemilik lahan/ bangunan disekitarnya.

Dari uji hipotesis dengan menggunakan uji F diketahui secara simultan variable Lokasi (X1), Waktu berjualan(X2), modal awal (X3) berpengaruh nyata terhadap variable terikat yaitu pengambilan keputusan. Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0.321 yang berarti variable Lokasi (X1), Waktu berjualan(X2), modal awal (X3) dapat menjelaskan variable terikat pendapatan pedagana kaki lima (Y) sebesar 32.1 % sedangkan sisanya sebesar 67.9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk mengetahui pengaruh dari masing – masing variable dari penelitan ini variable Lokasi (X1), Waktu berjualan (X2), modal awal (X3) secara parsial atau individu terhadap variable pengambilan keputusan (Y) digunakan analisis uji t. secara parsial variable variable Lokasi (X1), modal awal (X3) berpengaruh nyata terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Ini dapat dari nilai T hitung Lokasi (X1) sebesar 2.872, T hitung modal awal (X3) sebesar 2.718 > dari T table sebesar 1.683 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat diartikan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Untuk variabel waktu berjualan setelah di uji dengan menggunakan uji t ternyata tidak berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Ini terlihat dari nilai t hitung waktu berjualan (X2) sebesar 0.755 < nilai t table 1.683 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak ini berarti secara parsial dari variable waktu berjualan (X2) tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

Lokasi dan jumlah PKL yang mendapatkan Izin

No	Lokasi	Jumlah PKL	Jumlah PKL aktif
1	Sekitar pasar kota	126	120
2	Seputaran alun-alun	118	110
3	Jl. Panglima Sudirman	27	22
4	Terminal baru Bojonegoro	39	5
5	Terminal lama Bojonegoro	25	17
Jumlah		335	274

Hipotesa atau jawaban sementara dari penelitian “ Faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro ” di duga memberikan pengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Kota Bojonegoro, dimana masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Untuk itu langkah selanjutnya untuk melakukan analisa tersebut diperlukan data – data baik itu berupa data primer maupun data sekunder. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 45 responden. Setelah data diperoleh langkah selanjutnya data tersebut diolah dengan program SPSS. Analisa yang digunakan dalam statistik uji yaitu koefisien korelasi (r^2) dan uji hipotesa dengan menggunakan uji F test dan T test.

Dari uji hipotesis dengan menggunakan uji F diketahui secara simultan variable Lokasi (X1), Waktu berjualan(X2), modal awal (X3) berpengaruh nyata terhadap variable terikat yaitu pengambilan keputusan. Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0.321 yang berarti variable Lokasi (X1), Waktu berjualan(X2), modal awal (X3) dapat menjelaskan variable terikat pendapatan pedagana kaki lima (Y) sebesar 32.1 % sedangkan sisanya sebesar 67.9 % dijelaskan oleh varibel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini .

Untuk mengetahui pengaruh dari masing – masing variable dari penelitan ini variable Lokasi (X1), Waktu berjualan (X2), modal awal (X3) secara parsial atau individu terhadap variable pengambilan keputusan (Y) digunakan analisis uji t. secara parsial variable variable Lokasi (X1), modal awal (X3) berpengaruh nyata terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Ini dapat dari nilai T hitung Lokasi (X1) sebesar 2.872, T hitung modal awal (X3) sebesar 2.718 > dari T table sebesar 1.683 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat diartikan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Untuk varibael waktu berjualan setelah di uji dengan menggunakan uji t ternyata tidak berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan pedangan kaki lima. Ini terlihat dari nilai t hitung waktu berjualan (X2) sebesar 0.755 < nilai t table 1.683 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak ini berarti secara parsial dari variable waktu berjualan (X2) tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

KESIMPULAN

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang atau para pedagang yang melakukan kegiatan usaha menjual dan menjajakan dan atau mendistribusikan barang dan jasa di sektor informal, yang menggunakan bagian dari fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usahanya.

Fenomena mengenai PKL hampir terjadi di setiap daerah perkotaan dan kabupaten di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bojonegoro. Pedagang Kaki Lima di wilayah Bojonegoro sudah di atur dalam Peraturan Daerah Bojonegoro nomor 3 tahun 2006 dan peraturan Bupati nomor 14 tahun 2008 yang didalamnya memuat tentang segala hal yang berhubungan dengan PKL mulai dari Lokasi Berjualan, Waktu berjualan, tata cara pengurusan izin PKL.

Semakin hari jumlah PKL di Bojonegoro semakin meningkat dan itu disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjann di sektor formal terutama bagi mereka yang mempunyai tingkat pendidikan rendah. Seiring dengan bertambahnya jumlah maka permasalahan juga semakin banyak bermunculan yang pada intinya adalah pendapatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PKL di wilayah kecamatan kota Bojonegoro dengan menggunakan metode analisa data dan tertuang dalam baba-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai mana berikut :

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan SPSS dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel lokasi (X1), waktu berjualan (X2), modal awal (X3) secara simultan berpengaruh nyata terhadap pendapatan PKL.

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan SPSS dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel lokasi (X1) mempunyai pengaruh secara parsial terhadap pendapatan PKL. Selain variabel lokasi (X1) yang berpengaruh ternyata variabel Modal awal (X3) juga mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pendapatan PKL.

Dari hipotesa awal yang di buat bahwa lokasi (X1), waktu berjualan (X2), modal awal (X3) yang di duga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan PKL.

Setelah dilakukan hipotesa yang mengatakan bahwa variabel lokasi (X1) yang diduga mempunyai pengaruh yang sangat paling besar ternyata tidak terbukti karena ada variabel lain yaitu modal awal (X3) yang mempunyai pengaruh nyata terhadap pendapatan PKL.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Bojonegoro, 2009, Bojonegoro dalam angka tahun 2010.
- Jhingan, M.L, 2000, Ekonomi pembangunan dan perencanaan, PT. Rajagrafindo persada.
- Soehartono, Irawan, 2008, Metode Penelitian Sosial (cetakan ketuju), Bandung, PT Remaja rosdakarya.
- Suryana, 2000, ekonomi pembangunan problematika dan pendekatan, PT. salemba empat
- Tarigan, Robinson, 2006, perencanaan pembangunan wilayah (cetakan kedua), PT Bumi aksara
- Todaro, Michael. P, 2000 (edisi 3) Ekonomi untuk negara berkembang suatu pengantar tentang prinsip-prinsip masalah dan kebijakan pembangunan, PT. Bumi aksara